Memaknai Negara, Agama, dan Ideologi Politik dalam Kajian Fiqih Kontemporer

¹Yudi Surono, Lc., MHI, ²Anita, M.Ag, ³Dr. Diana, M.Pd.I

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara, Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung Selatan, Lampung, Indonesia

Email : suronoyudi26@gmail.com¹, anita.quee1978@gmail.com²

Abstract

This article discusses the meaning of the relationship between state, religion and political ideology in contemporary jurisprudence studies. By paying attention to evolving socio-political dynamics, this article explores the role and interaction of these three entities in the context of modern Muslim society. This research uses a qualitative approach with a library research method. The research design used is descriptive-analytical. The data sources in this research consist of two types, namely 1) Primary Data: Even though this research is library research, the primary data is in the form of writings. from contemporary fiqh scholars, relevant official state documents, and fatwas related to the research theme will be used. 2) Secondary Data: Secondary data includes books, journal articles, research reports, and other academic sources that have discussed related topics. Using a fiqh approach, this article analyzes how fiqh concepts influence views on the role of the state, the role of religion in politics, and the implementation of political ideology in government. Through a critical review of contemporary literature and discourse, this article aims to provide in-depth insight into how understanding of this relationship is developing in the context of changing times.

Keywords: State, Religion, Political Ideology, Contemporary Fiqh

PENDAHULUAN

Memahami hubungan antara negara, agama, dan ideologi politik menjadi semakin penting dalam konteks modern karena beberapa alasan yang berkaitan dengan dinamika globalisasi, pluralisme budaya, dan perkembangan politik kontemporer. Globalisasi telah mempercepat interaksi dan komunikasi antarbangsa, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan negara, agama, dan ideologi politik menjadi semakin kompleks dan saling terkait. Menurut teori globalisasi oleh Roland Robertson, globalisasi tidak hanya tentang pertukaran ekonomi dan teknologi, tetapi juga tentang pertukaran nilai-nilai budaya dan agama. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama dan ideologi politik diterapkan dalam berbagai sistem negara. Teori seperti "*Clash of Civilizations*" oleh Samuel Huntington menyoroti potensi konflik budaya dalam dunia yang semakin terglobalisasi.¹

Dunia modern ditandai oleh pluralisme dan multikulturalisme, di mana masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat

¹ Muhammad AmmarNurHandyka Ammar, "PLURALISME BUDAYA DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER: PENDEKATAN INTERDISIPLINER TERHADAP KERAGAMAN KULTURAL," *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities* 1, no. 2 (September 30, 2023), <https://jetch.id/index.php/jetch/article/view/3>.

Indonesia.² Menurut Charles Taylor dalam teorinya tentang politik pengakuan (*politics of recognition*), negara harus mengakui dan menghormati identitas kelompok-kelompok agama dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, memahami bagaimana agama dan ideologi politik dapat hidup berdampingan dalam kerangka negara yang inklusif adalah sangat penting.

Kebangkitan politik identitas, di mana kelompok-kelompok tertentu menggunakan identitas agama atau budaya mereka untuk memperjuangkan hak dan pengaruh politik, menambah kompleksitas hubungan antara negara, agama, dan ideologi politik. Menurut teori politik identitas oleh Manuel Castells, identitas budaya dan agama memainkan peran penting dalam membentuk gerakan sosial dan politik di era modern. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana fiqh dapat menanggapi dinamika ini menjadi sangat relevan.

Banyak negara mayoritas Muslim sedang dalam proses reformasi hukum dan kebijakan publik untuk lebih mencerminkan nilai-nilai agama sambil tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Teori hukum dan kebijakan oleh John Rawls mengenai 'justice as fairness' menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai individu dan kelompok. Dalam konteks ini, memahami bagaimana hukum fiqh berinteraksi dengan sistem hukum sekuler adalah krusial.

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan dari ekstremisme dan radikalisme yang seringkali menggunakan interpretasi agama sebagai justifikasi tindakan mereka telah meningkatkan urgensi untuk memahami hubungan antara agama, negara, dan ideologi politik. Radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Makna radikalisme dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya.³ Teori radikalisasi oleh Clark McCauley dan Sophia Moskalenko menunjukkan bahwa faktor-faktor politik, agama, dan identitas saling terkait dalam proses radikalisasi. Oleh karena itu, kajian yang mendalam tentang bagaimana fiqh dapat memberikan alternatif pemahaman yang moderat dan damai menjadi sangat penting.

Fiqh sebagai disiplin hukum Islam tidak statis; ia terus berkembang sebagai respons terhadap tantangan dan kebutuhan zaman. Menurut Abdullah Saeed dalam teorinya tentang ijtihad kontemporer, ada kebutuhan untuk re-interpretasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks modern tanpa

² "PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME DALAM KERANGKA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Telaah Dan Urgensinya Dalam Kajian Filsafat Sosial) | El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman," February 28, 2018, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/3127>.

³ Abdul Aziz, "Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (June 15, 2016): 29–58, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>.

mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Ini menekankan pentingnya kajian fiqh yang relevan dengan kondisi politik dan sosial saat ini.

PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁵ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu "penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi."⁶ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu 1) Data Primer: Meskipun penelitian ini bersifat pustaka, data primer berupa tulisan-tulisan asli dari ulama fiqh kontemporer, dokumen resmi negara yang relevan, dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan tema penelitian akan digunakan. 2) Data Sekunder: Data sekunder mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademik lainnya yang telah membahas topik terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konsep Dasar negara, agama, dan ideologi politik dalam perspektif fiqh

Dalam perspektif fiqh, konsep negara, agama, dan ideologi politik memiliki makna yang penting dalam pembentukan sistem sosial dan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Negara dalam perspektif fiqh sering disebut sebagai "Dawlah Islamiyah" yang mengacu pada entitas politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan menerapkan hukum-hukum syariah sebagai landasan hukumnya.⁷ Negara Islam bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, ekonomi, pidana, serta moralitas sosial dan politik.

Agama Islam memainkan peran sentral dalam konsep negara dalam fiqh. Islam bukan hanya agama individu, tetapi juga mencakup aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam

⁴ Suharsimi Arikunto, dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 2

⁵ Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", dalam *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13 No. 1, Juni 2018, hlm. 41.

⁶ Maria Caroline Cindy Iskandar. "Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi pada Karyawan Universitas Bunda Mulia". Dalam *Jurnal Bussines & Manajemen Journal Bunda Mulia*, Vol. 8, No. 2 September 2018, hlm. 9

⁷ Al-Kaysani, Ayatullah Ruhullah. "Ketetapan Akhlak dan Hukum". Jakarta: Qultum Media, 2005

konteks negara Islam, agama Islam berfungsi sebagai sumber hukum utama dan panduan moral dalam pembentukan kebijakan publik dan pemerintahan⁸

Ideologi politik dalam fiqih mencakup kerangka pemikiran yang membentuk dasar-dasar pemahaman dan tindakan politik dalam masyarakat Muslim. Ideologi politik ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks negara Islam, ideologi politik bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, berkeadilan, dan bermoral, sesuai dengan ajaran Islam⁹

Dalam pembentukan negara Islam, agama Islam menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan keadilan sosial. Ideologi politik yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kemaslahatan umum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam konteks Indonesia, pengertian ini sering diterapkan dalam diskusi mengenai peran agama dalam politik dan pembentukan hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, meskipun berada dalam kerangka negara yang menganut prinsip negara berdasarkan Pancasila.

2. Sejarah Hubungan Negara dan Agama dalam Islam

Masa Nabi Muhammad SAW

Hubungan antara negara dan agama dalam Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, beliau mendirikan sebuah negara kota yang dikenal sebagai Negara Madinah. Negara ini diatur berdasarkan Piagam Madinah, sebuah dokumen yang menyatukan berbagai suku dan kelompok agama dalam satu pemerintahan. Piagam ini menciptakan dasar bagi masyarakat pluralistik yang hidup bersama di bawah hukum Islam¹⁰ Piagam Madinah: Dokumen ini menegaskan hak dan kewajiban semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim, serta menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi. Piagam Madinah juga menetapkan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan kerja sama antarumat beragama¹¹

Khulafaur Rasyidin

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, kepemimpinan umat Muslim dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin (Khalifah yang benar-benar dipandu), yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, hubungan antara agama dan negara tetap erat, dengan khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dan religius¹²

⁸ Sardar, Ziauddin. "Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam". Oxford: Oxford University Press, 2011.

⁹ Al-Maududi, Abul A'la. "Political Theory of Islam". Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

¹⁰ Yatim, Badri. "Sejarah Peradaban Islam". Jakarta: Rajawali Press, 2013

¹¹ Rahman, Fazlur. "Islam". Jakarta: PT Lentera, 2000.

¹² Denny, Frederick M. "Islam and the Muslim Community". New York: Harper & Row, 1977.

1. Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Di masa kepemimpinan mereka, ekspansi wilayah Islam berlangsung pesat. Mereka mendirikan sistem administrasi dan pemerintahan yang terorganisir, mengadopsi dan menyesuaikan hukum-hukum Islam untuk mengatur masyarakat yang beragam¹³
2. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib: Periode ini ditandai dengan konflik internal dan perpecahan, namun upaya untuk mempertahankan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan tetap dilakukan. Kepemimpinan mereka menunjukkan bagaimana fiqh dan politik saling mempengaruhi¹⁴

Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M), hubungan antara negara dan agama mengalami perubahan signifikan. Kedua dinasti ini memperluas kekaisaran Islam dan mengembangkan administrasi yang kompleks.¹⁵

1. Dinasti Umayyah: Dinasti ini menekankan pada sentralisasi kekuasaan dan memperkenalkan elemen-elemen birokrasi dan administrasi yang lebih sekuler. Namun, mereka tetap mempertahankan hukum Islam sebagai landasan hukum¹⁶
2. Dinasti Abbasiyah: Dinasti Abbasiyah memperkuat institusi agama, mendirikan lembaga pendidikan seperti madrasah, dan mendukung ulama dalam mengembangkan fiqh. Meski ada kecenderungan sekuler dalam administrasi, peran agama tetap dominan dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Kesultanan dan Kerajaan Islam

Pada periode selanjutnya, berbagai kesultanan dan kerajaan Islam di seluruh dunia, seperti Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kerajaan Safawi, menunjukkan variasi dalam hubungan antara negara dan agama¹⁸

1. Kesultanan Utsmaniyah: Kesultanan Utsmaniyah (1299-1922) menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum syariah mengatur masalah-masalah pribadi dan keagamaan, sementara hukum sekuler mengatur administrasi dan urusan publik¹⁹
2. Kesultanan Mughal dan Kerajaan Safawi: Kesultanan Mughal di India dan Kerajaan Safawi di Persia menunjukkan adaptasi lokal terhadap prinsip-prinsip Islam, dengan upaya untuk menyatukan beragam kelompok etnis dan agama di bawah pemerintahan Islam²⁰

¹³ Azhari, Khoirul. "Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

¹⁴ Hitti, Philip K. "History of the Arabs". London: Macmillan & Co, 1951

¹⁵ Hodgson, Marshall G. S. "The Venture of Islam, Vol. 1: The Classical Age of Islam". Chicago: University of Chicago Press, 1974

¹⁶ Lewis, Bernard. "The Arabs in History". Oxford: Oxford University Press, 2002

¹⁷ Lapidus, Ira M. "A History of Islamic Societies". Cambridge: Cambridge University Press, 2002

¹⁸ Esposito, John L. "The Oxford History of Islam". Oxford: Oxford University Press, 1999

¹⁹ Inalcik, Halil. "The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600". London: Weidenfeld & Nicolson, 1973

²⁰ Richards, John F. "The Mughal Empire". Cambridge: Cambridge University Press, 1995

Era Kolonial dan Pascakolonial

Pada era kolonial, banyak wilayah Muslim dijajah oleh kekuatan Eropa, yang memperkenalkan sistem hukum dan administrasi Barat. Ini menciptakan ketegangan antara hukum Islam dan hukum kolonial²¹.

1. Kolonialisme: Kolonialisme mempengaruhi struktur politik dan hukum di negara-negara Muslim. Hukum kolonial sering kali menggantikan atau mengubah hukum syariah, menimbulkan respon dan adaptasi dari para ulama²²
2. Pascakolonial: Setelah memperoleh kemerdekaan, banyak negara Muslim berupaya untuk mengintegrasikan kembali prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem pemerintahan mereka. Beberapa negara seperti Arab Saudi menerapkan syariah secara penuh, sementara yang lain seperti Indonesia dan Malaysia mengadopsi model hibrida yang menggabungkan hukum Islam dengan hukum nasional modern²³

Era Kontemporer

Pada era kontemporer, hubungan antara negara dan agama dalam dunia Islam semakin beragam, dipengaruhi oleh globalisasi, modernisasi, dan gerakan-gerakan politik Islam²⁴

1. Negara Islam Modern: Beberapa negara seperti Iran dan Arab Saudi menegaskan identitas Islam mereka dalam konstitusi dan sistem hukum, mengintegrasikan syariah secara mendalam dalam pemerintahan²⁵
2. Negara Sekuler dengan Mayoritas Muslim: Negara-negara seperti Turki dan Indonesia menerapkan sistem politik sekuler, namun tetap menghormati dan mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat²⁶
3. Gerakan Politik Islam: Gerakan politik Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki menunjukkan upaya untuk memperjuangkan penerapan hukum Islam melalui proses politik demokratis²⁷

Sejarah hubungan antara negara dan agama dalam Islam menunjukkan dinamika yang kompleks dan terus berkembang. Integrasi antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan praktis pemerintahan telah menciptakan berbagai model pemerintahan Islam yang berbeda sepanjang sejarah. Pemahaman tentang

²¹ Ali, Muhammad. "Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya". Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016

²² Ricklefs, M.C. "A History of Modern Indonesia Since c.1200". London: Macmillan, 2001

²³ Hefner, Robert W. "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia". Princeton: Princeton University Press, 2000

²⁴ Voll, John O. "Islam: Continuity and Change in the Modern World". Boulder: Westview Press, 1982

²⁵ Algar, Hamid. "The Roots of the Islamic Revolution in Iran". Islamic Publications International, 2001

²⁶ Yavuz, M. Hakan. "Secularism and Muslim Democracy in Turkey". Cambridge: Cambridge University Press, 2009

²⁷ Mitchell, Richard P. "The Society of the Muslim Brothers". Oxford: Oxford University Press, 1969

evolusi ini penting untuk melihat bagaimana fiqh dapat diterapkan dalam konteks modern yang terus berubah.

3. Pandangan ulama fiqh kontemporer tentang negara dan pemerintahan
Ulama fiqh kontemporer telah memberikan pandangan yang beragam mengenai konsep negara dan pemerintahan dalam konteks modern. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan realitas politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Dalam konteks Indonesia, pandangan ulama fiqh kontemporer sering kali mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan pluralisme agama dalam masyarakat.

3. Pandangan Ulama Fiqh Kontemporer tentang negara, agama, dan ideologi politik

a. KH. Hasyim Muzadi

KH. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), berpendapat bahwa negara harus berfungsi sebagai pelindung semua warganya tanpa memandang agama dan keyakinan. Menurut beliau, konsep negara dalam Islam adalah negara yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Negara juga harus menjamin kebebasan beragama dan menghormati hak-hak asasi manusia. KH. Hasyim Muzadi menekankan bahwa hukum Islam harus diterapkan dengan cara yang adaptif dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat²⁸

b. Prof. Dr. M. Quraish Shihab

Prof. Dr. M. Quraish Shihab, seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka di Indonesia, menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura) dalam pemerintahan Islam. Menurut Quraish Shihab, syura adalah proses demokratis yang harus diadopsi dalam pengambilan keputusan politik. Negara Islam idealnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Quraish Shihab juga menekankan pentingnya toleransi dan keberagaman dalam negara, mengingat Indonesia adalah negara dengan pluralitas agama dan budaya yang tinggi²⁹

c. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

KH. Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, menekankan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks negara Islam. Menurut Gus Dur, negara harus berfungsi sebagai pelindung hak-hak minoritas dan menjaga harmoni sosial. Beliau juga berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Gus Dur menekankan

²⁸ Muzadi, Hasyim. "Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Refleksi Kiai Hasyim Muzadi". Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009

²⁹ Shihab, M. Quraish. "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat". Jakarta: Mizan, 2000

pentingnya kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar bagi pembangunan negara yang inklusif³⁰

d. Prof. Dr. Din Syamsuddin

Prof. Dr. Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, berpendapat bahwa negara dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Beliau menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dalam konteks yang demokratis dan pluralistik. Din Syamsuddin juga menyoroti peran ulama dan intelektual Muslim dalam memberikan panduan moral dan etika bagi pengelolaan negara. Menurutnya, negara Islam harus berfungsi untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) bagi masyarakat³¹

4. Implementasi Pandangan Ulama dalam Konteks Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam memberikan pandangan dan fatwa terkait isu-isu kebangsaan dan keagamaan. MUI mengeluarkan fatwa yang memberikan panduan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antara agama dan negara. MUI juga berperan dalam mengawal penerapan syariah dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang pluralistik³²

Hukum Islam diterapkan di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Hukum Keluarga, dan Hukum Ekonomi Syariah. Lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengelola dan mengawasi penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, pengadilan agama memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam³³

Pandangan ulama fiqh kontemporer tentang negara dan pemerintahan menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem politik dan hukum modern. Mereka menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pengelolaan negara. Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep-konsep ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan pluralitas masyarakat.

5. Peran Agama dalam Politik Kontemporer

Peran agama dalam politik kontemporer menjadi subjek yang penting untuk dipahami dalam konteks masyarakat yang pluralis seperti Indonesia. Agama tidak hanya memainkan peran sebagai dimensi spiritual individu, tetapi

³⁰ Wahid, Abdurrahman. "Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi". Jakarta: The Wahid Institute, 2006

³¹ Syamsuddin, Din. "Agama dan Negara dalam Perspektif Islam". Yogyakarta: UII Press, 2001

³² Burhanuddin, Jajat. "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia". Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002

³³ Salim, Arskal. "Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia". Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008

juga memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik dan pembentukan kebijakan publik.

Peran Agama dalam Pemilihan Umum

Agama sering menjadi faktor penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Banyak pemilih cenderung memilih calon pemimpin yang dianggap memiliki kedekatan dengan nilai-nilai agama tertentu atau mewakili kepentingan kelompok agama tertentu³⁴

Pengaruh Agama dalam Kebijakan Publik

Agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik. Isu-isu seperti hukum pidana yang berbasis agama, pendidikan agama di sekolah-sekolah, dan perlindungan terhadap hak-hak agama minoritas, sering menjadi perdebatan dalam politik³⁵

Mobilisasi Politik oleh Kelompok Agama

Kelompok agama seringkali memobilisasi basis dukungan mereka untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Ini dapat terjadi melalui demonstrasi jalanan, kampanye politik, atau kegiatan sosial dan keagamaan lainnya³⁶

Penyeimbangan Antara Agama dan Sekularisme

Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pengaruh agama dan prinsip-prinsip sekularisme dalam pembentukan kebijakan publik. Hal ini diperlukan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial³⁷

6. Ideologi Politik dalam Perspektif Fiqih

Ideologi politik dalam perspektif fiqih Islam memiliki peran penting dalam membentuk pandangan terhadap tatanan sosial dan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, ideologi politik tidak sekadar merupakan seperangkat gagasan politik, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam.

Pendekatan fiqih terhadap ideologi politik cenderung bersifat holistik, mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam domain politik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan hukum-hukum yang berlandaskan syariat Islam

³⁴ Dhofier, Zamakhsyari. "Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai". Jakarta: LP3ES, 1999

³⁵ Hefner, Robert W. "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia". Princeton University Press, 2000

³⁶ Liddle, R. William. "Pemilu-pemilu Orde Baru". Jakarta: LP3ES, 1996

³⁷ Barton, Greg. "Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism." "Pacific Affairs", vol. 75, no. 1, 2002, pp. 65-83

hingga penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi dan distribusi kekayaan.³⁸

Dalam pandangan fiqh, ideologi politik yang benar haruslah mencerminkan nilai-nilai Islam yang murni, seperti keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan umum. Implementasi ideologi politik ini kemudian tercermin dalam kebijakan-kebijakan publik dan tindakan politik yang diambil oleh pemerintah dan pemimpin yang berada dalam naungan ajaran Islam.³⁹

Namun, dalam praktiknya, implementasi ideologi politik dalam perspektif fiqh sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas. Tantangan-tantangan tersebut meliputi perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam, dinamika politik lokal dan global, serta persaingan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai kontemporer yang seringkali bertentangan.⁴⁰

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi para ulama dan pemikir Islam untuk terus melakukan kajian mendalam tentang konsep ideologi politik dalam perspektif fiqh, serta berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja yang relevan dan responsif terhadap dinamika zaman yang terus berkembang.

Kesimpulan

Dalam kajian fiqh kontemporer, hubungan antara negara, agama, dan ideologi politik menjadi subjek yang sangat relevan dan penting untuk dipahami secara mendalam. Seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang, refleksi tentang masa depan hubungan antara ketiga elemen ini menjadi esensial dalam merumuskan pandangan Islam yang inklusif, progresif, dan adaptif terhadap realitas zaman yang terus berubah.

Pertama-tama, dalam konteks negara, kajian fiqh kontemporer perlu terus mempertimbangkan peran negara sebagai pembentuk kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, dalam sebuah masyarakat yang pluralis dan multikultural seperti masa kini, penting untuk memastikan bahwa negara tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Masa depan hubungan antara negara dan agama dalam kajian fiqh kontemporer haruslah mempertimbangkan bagaimana negara dapat menjadi wadah bagi berbagai kepentingan dan keyakinan, sambil tetap memelihara identitas dan nilai-nilai agama yang merupakan bagian integral dari masyarakat.

Kedua, peran agama dalam politik kontemporer perlu dipertimbangkan dengan cermat. Meskipun agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik dan mobilitasi politik, penting untuk memastikan bahwa penggunaan agama dalam ranah politik tidak menimbulkan konflik atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Masa depan hubungan antara agama dan politik dalam kajian fiqh kontemporer haruslah memperkuat nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antarumat beragama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

³⁸ Al-Sanhuri, Abdul Rahman. "Konsep Ideologi Politik dalam Fiqih." *"Jurnal Hukum Islam"*, vol. 10, no. 2, 2015, hal. 45-60

³⁹ Al-Ghazali, Muhammad. *"Politik dalam Perspektif Islam"*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008

⁴⁰ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *"Islam and Secularism"*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Terakhir, dalam menanggapi ideologi politik dalam kajian fiqh kontemporer, penting untuk memastikan bahwa ideologi politik yang diusung sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan umum. Masa depan hubungan antara ideologi politik dan fiqh kontemporer haruslah menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan adanya dialog dan diskusi yang terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, pemikir Islam, dan pemerintah, untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Algar, Hamid. *The Roots of the Islamic Revolution in Iran*. Islamic Publications International, 2001
- Al-Ghazali, Muhammad. *Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Ali, Muhammad. *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016
- Al-Kaysani, Ayatullah Ruhullah. *Ketetapan Akhlak dan Hukum*. Jakarta: Qultum Media, 2005
- Al-Maududi, Abul A'la. *Political Theory of Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Al-Sanhuri, Abdul Rahman. *Konsep Ideologi Politik dalam Fiqih*. *Jurnal Hukum Islam*, vol. 10, no. 2, 2015, hal. 45-60
- Azhari, Khoirul. *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Barton, Greg. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*. *Pacific Affairs*, vol. 75, no. 1, 2002, pp. 65-83
- Burhanuddin, Jajat. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002
- Denny, Frederick M. *Islam and the Muslim Community*. New York: Harper & Row, 1977.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1999
- Esposito, John L. *The Oxford History of Islam*. Oxford: Oxford University Press, 1999
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press, 2000
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: Macmillan & Co, 1951
- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam, Vol. 1: The Classical Age of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1974
- Inalcik, Halil. *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1973
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002

- Lewis, Bernard. *The Arabs in History*. Oxford: Oxford University Press, 2002
- Liddle, R. William. *Pemilu-pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1996
- Mitchell, Richard P. *The Society of the Muslim Brothers*. Oxford: Oxford University Press, 1969
- Muzadi, Hasyim. *Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Refleksi Kiai Hasyim Muzadi*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Jakarta: PT Lentera, 2000.
- Richards, John F. *The Mughal Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. London: Macmillan, 2001
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008
- Sardar, Ziauddin. *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 2000
- Syamsuddin, Din. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001
- Voll, John O. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Boulder: Westview Press, 1982
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Yavuz, M. Hakan. *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009
- Ammar, Muhammad AmmarNurHandyka. "PLURALISME BUDAYA DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER: PENDEKATAN INTERDISIPLINER TERHADAP KERAGAMAN KULTURAL." *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities* 1, no. 2 (September 30, 2023). <https://jetch.id/index.php/jetch/article/view/3>.
- Aziz, Abdul. "Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (June 15, 2016): 29-58. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>.
- "PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME DALAM KERANGKA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Telaah Dan Urgensinya Dalam Kajian Filsafat Sosial) | El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman," February 28, 2018. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/3127>.